

**Bab 1** : " Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara"  
**SUB** : Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara  
**Kelas** : VII (Tujuh)

#### **A. TUJUAN PEMBELAJARAN**

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:

- Bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- Bersyukur memiliki para pendiri Negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara.
- Ber perilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara.
- Berani berperan/mensimulasikan sebagai pendiri negara.
- Mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI.

#### **B. MATERI PEMBELAJARAN**

##### **Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara**

##### **1. Pembentukan BPUPKI**

Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat, kekalahan Belanda oleh Jepang dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang.

Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti "Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia" untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia.

Pada tahun 1945, tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Seperti pada perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya, termasuk di Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia.

Janji Jepang membentuk BPUPKI (*Dokuritu Zyunbi Tyoosakai*) direalisasikan, pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang, dengan anggota berjumlah enam puluh dua (62) orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh (7) orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso.

BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak dua kali, yaitu sidang I dan II.

### ***Sidang I***

Sidang I BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Pada sidang I ini dibahas tentang dasar negara.

### ***Sidang II***

Sidang II BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 – 17 Juli 1945. Pada sidang II ini dibahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar.

## **2. Perumusan Dasar Negara**

Ketua BPUPKI dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat pada pidato awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara.

Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno.

### **1). Muhammad Yamin (29 Mei 1945)**

Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan lima dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut.

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Sosial

Kemudian secara tertulis, Muhammad Yamin menyampaikan bahwa asas dan dasar Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **2). Soepomo (31 Mei 1945)**

Menurut Soepomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut.

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

### 3). Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut.

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja yang di antaranya ialah Panitia Sembilan, yang terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, , Mr. A. A. Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdulkahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, K. H. A. Wachid Hasyim, dan Mr. Mohammad Yamin

Panitia sembilan mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar (Undang-Undang Dasar).

Oleh Ir. Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama "Mukadimah", oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan "Piagam Jakarta", dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut "Gentlemen's Agreement".

Naskah "Mukadimah" yang ditandatangani oleh sembilan orang anggota Panitia Sembilan, dikenal dengan nama "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter".

Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. (1). Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk- pemeluknya (2). Kemanusiaan yang adil dan beradab (3). Persatuan Indonesia (4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permu- syawaratan perwakilan (5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Karena adanya keberatan dan untuk menghindari perpecahan, para tokoh bersepakat untuk mengubah kalimat "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa.

**C. Silahkan lihat Vidio untuk penjelasan lebih lengkapnya :**

Nama :  
Kelas :  
No. Absen :

### TUGAS DAN LATIHAN

**I. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar !**

1. Belanda kalah perang oleh Jepang pada perang
2. Setelah dijajah oleh Belanda kemudian bangsa Indoensia di jajah oleh
3. Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal, bulan dan tahun
4. Bersamaan dengan hari ulang tahun kaisar Jepang bernama
5. BPUPKI sevara resmi dilantik oleh Jepang terdiri dari Indonesia dan Jepang

**II. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan mengklik lingkaran di huruf a, b, c, dan d !**

1. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal ....
  - a. 26 April 1945
  - b. 27 April 1945
  - c. 28 April 1945
  - d. 29 April 1945.
2. Pembentukan BPUPKI bertepatan dengan hari ulang tahun kaisar Jepang yang bernama ....
  - a. Hirosihima
  - b. Hinohito
  - c. Hirohito
  - d. Hiramaya
3. Ketua BPUPKI yang berasal dari Indonesia adalah ....
  - a. dr K.R.T Radjiman Widyodiningrat
  - b. dr Sutomo
  - c. Ir. Soekarno
  - d. H. Soeharto
4. Sidang I BPUPKI dilaksanakan pada tanggal ....
  - a. 28 Mei – 2 Juni 1945
  - b. 29 Mei – 1Juni 1945
  - c. 30 Mei – 3 Juni 1945
  - d. 31 Mei – 4 Juni 1945
5. Pada siding I BPUPKI membahas tentang ....
  - a. Rumusan UUD 1945
  - b. Undang=undang
  - c. Dasar Negara
  - d. Keputusan Presiden



III. Lengkapi kalimat berikut dengan menarik (mendrag) lalu tempelkan kata tersebut dengan menjatuhkan (mendrop) agar kalimat menjadi benar !

Belanda oleh Jepang dalam perang 1. \_\_\_\_\_ menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 2, \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_ direalisasikan, pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Pada sidang BPUPKI I dibahas tentang 4. \_\_\_\_\_  
 Sedangkan pada Sidang BPUPKI II dibahas tentang 5. \_\_\_\_\_

Jepang	BPUPKI
Undang-undang Dasar Negara 1945	Dasar Negara
Asia Timur Raya	

IV. Silakan tarik garis dari lajur kanan ke lajur kiri sehingga menjadi jawaban yang benar !

Soal

Jawaban

29 Mei – 1 Juni 1945	Naskah "Mukadimah" yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia Sembilan
Ir. Soekarno	Tentang UUD 1945
Piagam Jakarta (Jakarta Carter)	Ketua BPUPKI dari Indonesia
dr KRT Radjiman Widyodiningrat	Sidang BPUPKI 1
Sidang BPUPKI II	Mufakat atau demokrasi